

Efektivitas Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Sidoarjo

Anton Widodo*, Ahmad Riyadh UB

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh serta faktor pendukung dan penghambat efektivitas program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif Milles dan Hubberman. Hasil penelitian menyatakan bahwa Program KOTAKU sudah efektif karena memenuhi indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan program, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Program KOTAKU tersebut memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni kompetensi fasilitator, fasilitas memadai, anggaran yang memadai, struktur organisasi yang jelas. Faktor penghambat yaitu informasi tidak benar atau hoax yang beredar di media sosial tentang Program KOTAKU, dan keterbatasan jumlah fasilitator dalam membantu implementasi program.

Kata Kunci: Program KOTAKU, kawasan kumuh, efektifitas kebijakan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/webofscientist.v2i2.25>

*Correspondence: Anton Widodo

Email: antonwidodo01@gmail.com

Received: 11-04-2023

Accepted: 19-05-2023

Published: 24-06-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this study is to describe and analyze the effectiveness of the KOTAKU program in reducing the area of slum settlements as well as the factors supporting and inhibiting the effectiveness of the KOTAKU program in reducing the area of slum settlements in Sruni Village, Gedangan District, Sidoarjo Regency. This study uses a qualitative approach. Analysis of the data used is a qualitative analysis of Milles and Hubberman. The results of the study stated that the KOTAKU Program was effective because it met the indicators of clarity of objectives to be achieved, clarity of strategy for achieving program objectives, solid policy analysis and formulation processes, careful planning, proper program preparation, availability of work facilities and infrastructure, effective implementation and efficient, educational supervision and control system. The KOTAKU program has supporting and inhibiting factors. The supporting factors are the competence of the facilitator, adequate facilities, adequate budget, and a clear organizational structure. The inhibiting factors are incorrect information or hoaxes circulating on social media about the KOTAKU Program, and the limited number of facilitators in assisting program implementation.

Keywords: KOTAKU Program, slum areas, policy effectiveness

Pendahuluan

Fenomena permukiman kumuh ini banyak didapati di berbagai daerah di dunia, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, dan lainnya. Salah satu penyebab mendasar munculnya pemukiman kumuh ini adalah tidak lepas dari penambahan jumlah penduduk di suatu wilayah, sedangkan kemampuan untuk mendirikan atau memiliki rumah yang layak huni sangat minim, sehingga banyak bermunculan rumah-rumah semi permanen yang tidak layak huni.

Sebuah rumah bisa disebut sebagai rumah yang layak huni jika memenuhi beberapa indikator, yaitu meliputi 1) akses terhadap kebutuhan dasar yang cukup, 2) sanitasi yang memadai, ketersediaan air bersih, 3) ketahanan bangunan, ruang hidup yang memadai, serta 4) jaminan layak huni (Setiyawan dkk., 2021).

Sedangkan menurut Sinulingga permukiman kumuh adalah lingkungan hunian atau tempat tinggal/rumah beserta lingkungannya, yang memiliki fungsi sebagai rumah tinggal dan sarana membina keluarga, namun rumah/lingkungan tersebut tidak layak untuk dijadikan hunian, sebab tingkat kepadatan bangunan yang terlalu tinggi, sarana dan prasarana yang minim, fasilitas umum yang sangat kurang, serta kondisi lingkungan yang kurang sehat (Sinulingga, 2005). Permasalahan lingkungan permukiman kumuh tersebut memang sangat kompleks, karena problemnya tidak hanya terletak pada kondisi fisik bangunan dan tingkat kepadatannya, namun juga menyangkut kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat yang tinggal di tempat yang kumuh tersebut.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah : “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Adapun pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan usaha yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum. Dengan demikian, lingkungan hidup pada prinsipnya adalah suatu sistem yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya yang mencakup hampir semua unsur ciptaan makhluk hidup yang ada di bumi ini.

Dalam rangka untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan mengelola lingkungan menjadi lebih baik, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dengan perbagaikan lingkungan permukiman kumuh. Upaya-

upaya tersebut masih terus dilakukan, walaupun pada kenyataannya problem pemukiman kumuh tersebut masih terus tumbuh, terutama di kota-kota besar di Indonesia.

United Nation Development Programme (UNDP) dalam sebuah hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terjadinya perluasan permukiman kumuh mencapai 1,37% setiap tahunnya, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1 Lampiran 1 luas kumuh pada tahun 2004 luas pemukiman kumuh di Indonesia mencapai 54.000 hektar. Sementara tahun 2009, luas pemukiman kumuh menjadi 57.800 hektar. Dalam rentang lima tahun, kawasan kumuh bertambah menjadi 3.800 hektar. Kemudian, melalui Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015, pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luas permukiman kumuh perkotaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan jika tidak ada bentuk penanganan yang efektif, komprehensif, dan tepat sasaran.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) IV 2015-2019, yaitu mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Amanat ini pada dasarnya selaras dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia, serta merupakan hak warga negara Indonesia dan menjadi kewajiban Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak.

Amanat RPJMN Tahun 2015-2019 tersebut kemudian dimanifestasikan oleh pemerintah ke dalam sebuah bentuk program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2016 yang lalu. Sehingga lahirlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, sebagai dasar hukum dari program KOTAKU tersebut.

Program KOTAKU ini pada dasarnya menjadi tugas besar Pemerintah Daerah selaku aktor utama dalam proses penanggulangan permukiman kumuh dan mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mensupport terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Peningkatan akses terhadap infrastruktur tersebut di tinjau pada kriteria kekumuhan yang menjadi dasar perhitungan pengurangan

luas kumuh sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang mencakup : 1) bangunan gedung;

[1] jalan lingkungan; 3) penyediaan air minum; 4) drainase lingkungan; 5) pengelolaan air limbah; 6) pengelolaan persampahan; dan 7) proteksi kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten yang menjalankan dan menyukseskan program KOTAKU untuk mengentaskan pemukiman kumuh, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/452/4041.3.2/205 tanggal 27 April 2015 Tentang Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, menurut Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/311/438.1.1.3/2021 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidoarjo terdapat 14 dari 18 Kecamatan di Sidoarjo yang masih memiliki kawasan kumuh, di antaranya Balongbendo, Candi, Gedangan, Krembung, Krian, Porong, Sedati, Sidoarjo, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Waru, Jabon, dan Tarik. Salah satu kecamatan dengan kawasan kumuh yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Gedangan. Pada Kecamatan Gedangan sendiri terdapat 4 kelurahan/desa dengan kawasan kumuh, di antaranya Desa Bangah, Punggul, Sawotratap, dan Sruni.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, masih terdapat beberapa kawasan kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan dengan genangan air setelah turun hujan, terdapat jalan yang berlubang, adanya sampah di jalanan, serta masih ada permukiman yang tidak dilengkapi dengan fasilitas MCK. Selain itu terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh Tim Pelaksana Pembangunan Desa Sruni kurangnya kontribusi warga sekitar untuk mengurangi luasan permukiman kumuh, kurangnya dana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penelitian ini layak dilakukan mengingat saat perencanaan sampai proses pelaksanaan banyak terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh Tim Pelaksana Pembangunan Desa Sruni, sehingga perlu diketahui sejauh mana efektivitas dari program KOTAKU di desa tersebut. Karena itulah penelitian ini berpusat pada dua persoalan yaitu Bagaimana efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?, serta Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?

Charles O. Jones mengemukakan bahwa istilah kebijakan (*politic term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun seringkali dimaksudkan pada suatu kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering disamakan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standart, proposal, dan *grand design* (Winarno, 2016).

Effendy memberikan definisi efektivitas berikut ini : “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” Efektivitas diartikan sebagai sebuah pengukuran atas capaian suatu saaran yang telah ditetapkan (Effendy, 2008). Taraf efektivitas bisa dinilai melalu perbandingan antara rencana yang sudah ditetapkan dan hasil yang diraih. Namun, apabila program yang dijalankan kurang tepat yang berdampakpada tujuan tidak dapat dicapai sesuai yang diinginkan, hal tersebutdinyatakan tidak efektif. Indikator atau ukuran capaian disampaikan oleh Siagian, yaitu adanya tujuan yang jelas, adanya strategi pencapaian tujuan yang jelas, adanya proses analisis dan perumusan kebijakan yang pasti, perencanaan yang matang, program yang disusun dengan tepat, sarana prasarana kerja yang tersedia, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan sistem pengawasan serta pengendalian yang mampu memberikan edukasi (S. Siagian, 2008).

Pemukiman kumuh adalah sebuah kawasan yang didalamnya terdapat rumah beserta sarana dan prasarana yang tidak layak, tidak sehat, serta tidak tertata dengan baik (Kurniasih, 2007). Sedangkan menurut Yunus, permukiman kumuh adalah permukiman yang secara fisik material, fasilitas permukiman dan lingkungannya berada dibawah standar kelayakan

Sinulingga mengartikan pemukiman kumuh sebagai sebuah lingkungan hunian atau tempat tinggal/rumah yang memiliki fungsi sebagai rumah tinggal dan pembinaan keluarga, namun rumah atau lingkungan tersebut jika dilihat dari berbagai aspek merupakan lingkungan atau rumah yang tidak layak untuk di huni, baik dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat (Sinulingga, 2005). Olotuah, juga mendefinisikan perumahan kumuh sebagai sebuah lingkungan perumahan yang berada di bawah standar, dimana kondisi bangunan fisik yang rusak, lingkungan yang tidak sehat, dan tidak adanya fasiltas dasar seperti; listrik, air minum, sistem drainase, sekolah, fasilitas kesehatan, dan area rekreasi. Kondisi seperti ini dapat terjadi karena penuaan bangunan yang terjadi secara alami, tidak adanya pemeliharaan, sanitasi yang buruk dan pemanfaatan tanah yang salah (Olotuah, 2012). Menurut Suparlan dalam Oktaviansyah, pemukiman kumuh dapat dikenali dari fasilitas umum yang tidak memadai, kondisi hunian rumah tidak terawat dan kotor, dan tata letak pemukiman yang tidak teratur (Oktaviansyah, 2012). Menurut Budiharjo, pemukiman kumuh dapat dikenali melalui karakteristik rumah dan prasarana yang ada (Budiharjo, 1998). Menurut Hariyanto, munculnya kawasan kumuh (*slum*) bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung (Santosa, 2012).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong ruang lingkup penelitian kualitatif terbatas pada usaha mengungkap suatu permasalahan atau

kondisi atau kejadian yang sebenarnya (Moleong, 2016). Hasil penelitian difokuskan pada deskripsi secara objektif mengenai suatu keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diteliti. Penelitian kualitatif yang diartikan mengeksplorasi pengalaman subjektif orang. Serta makna yang dan pengalaman-pengalaman yang saling berhubungan. Wawancara intensif sangat memungkinkan orang untuk berpendapat secara bebas dan memberikan interpretasi atas sebuah fakta dan perspektif mereka lah yang terpenting. Teknik penentuan informan ini memakai teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampling berdasarkan kriteria (Sugiyono, 2019). Kriteria informan atau narasumber penelitian ini yaitu orang memahami dan relevan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan fokus penelitian ini. Informan penelitian ini terdiri atas Koordinator Kota Program Kotaku Kabupaten Sidoarjo sebagai key informan, Kepala Desa Sruni, Anggota LKM Desa Sruni, dan Warga Masyarakat Desa Sruni sebagai informan.

Dalam penelitian kualitatif fokus penelitian digunakan untuk memperdalam suatu penelitian. Fokus penelitian menurut Sugiyono, yaitu untuk membatasi suatu penelitian untuk memilih data mana yang sesuai, data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Sugiyono, 2019). Perumusan suatu masalah dalam penelitian kualitatif lebih bersifat tentative, yang berarti penyempurnaan fokus suatu rumusan masalah tetap dilakukan walaupun sudah berada di lapangan. Adapun fokus penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengatasi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, meliputi: (a) Kejelasan tujuan program; (b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan program; (c) Proses analisis dan perumusan kebijakan program yang mantap; (d) Perencanaan yang matang; (e) Penyusunan program yang tepat; (f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja; (g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien; (h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik (S. P. Siagian, 2008).
2. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan pemaparan hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Sidoarjo efektif berdasarkan delapan indikator efektivitas. Berdasarkan pendapat Siagian tentang efektivitas program, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah menjalankan implementasi program secara efektif (S. P. Siagian, 2008).

A. Efektivitas Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Kejelasan Tujuan Program

Tujuan Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sangat jelas. Tujuan program KOTAKU ialah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara lain sebagai berikut: menurunnya luas permukiman kumuh, terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik, tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan peningkatan kualitas permukiman kumuh, terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator outcome yaitu 1) meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan a) drainase, b) air bersih/minum, c) pengelolaan persampahan, d) pengelolaan air limbah, e) pengamanan kebakaran, f) ruang terbuka publik. 2) enurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik, 3) terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU, 4) penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh, 5) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.

Tujuan dibuatnya program KOTAKU ini dapat dilihat dari tercapainya indikator-indikator di atas. Apabila akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih, pengelolaan air limbah yang tidak mencemari lingkungan, pengelolaan persampahan yang baik, dan adanya Ruang Terbuka Hijau, maka program ini dapat dikatakan berhasil.

Tujuan yang jelas dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian (2008) bahwa implementasi program yang efektif dapat dinilai dari aspek tujuan program yang akan dicapai jelas (S. Siagian, 2008). Tujuan yang akan dicapai oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan berdampak pada

penyimpangan program. Upaya mencapai tujuan program yang konsisten dan jelas akan memunculkan keberlangsungan dari program yang efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani yang menyatakan bahwa implementasi program KOTAKU akan dapat mencapai tujuan jika disertai dengan kejelasan tujuan (Fitriani, 2020). Kejelasan tujuan yang akan dicapai menjadi kunci penting untuk mendapatkan efektivitas program.

Berdasarkan uraian di atas, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memiliki kejelasan tujuan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator pertama dari efektifitas program, yakni kejelasan tujuan Program KOTAKU.

Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan Program

Strategi yang digunakan oleh Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sangat jelas. Strategi program KOTAKU ialah dengan melakukan pendekatan ke semua pihak secara tuntas. Strategi merupakan “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

Strategi yang dilakukan untuk menangani kawasan kumuh ini melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) antara lain melakukan pendekatan penanganan kawasan kumuh yang terfokus dan tuntas. Dalam perencanaan ini, diharapkan hingga proses pelaksanaannya dapat berjalan beriringan, sehingga selain tujuan penanganan tercapai tanpa memunculkan masalah baru (kumuh baru), strategi lain dalam penanganannya dilakukan secara komprehensif, yakni infrastruktur, sosial dan ekonomi, dislokasi kumuh dan membangun kolaborasi antar pelaku, serta program dan pendanaan (tingkat komunitas, daerah dan pusat).

Adapun strategi yang disusun oleh Tim Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: 1) strategi Dasar Kolaborasi, yaitu seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh. 2) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat, 3) menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor, 4) memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya, 5) memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (*baseline*) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian, 6) meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota, 7) mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan, 8) advokasi kepastian bermukim

bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci, 9) memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

Dengan adanya strategi dalam melaksanakan program, maka tujuan program akan lebih mudah tercapai. Hal ini dikarenakan strategi akan membantu pelaksana program untuk mencapai apa yang menjadi tujuan program, dan meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak negatif yang terjadi jika program tidak memiliki strategi dan prinsip

Strategi yang jelas dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian bahwa implementasi program yang efektif dapat dilihat dari aspek strategi program yang akan dicapai jelas (S. Siagian, 2008). Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan program harus jelas dan tidak bias. Karena apabila tidak jelas akan berefek pada kesalahan sasaran program. Upaya mencapai tujuan program dengan menggunakan strategi yang jelas akan membuat program lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani yang menyatakan bahwa akibat strategi yang jelas akan membuat mudah dalam mencapai kriteria program KOTAKU (Fitriani, 2020). Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan yang akan dicapai menjadi aspek penting untuk menjalankan program yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memiliki kejelasan dalam strategi Program KOTAKU. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator ke dua dari efektifitas program, yakni kejelasan dalam strategi pencapaian tujuan Program KOTAKU.

Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan Program yang Mantap

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional

Perumusan kebijakan merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau *problem* yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.

Wahab mengemukakan ciri-ciri dari kebijakan publik, yaitu: 1) Kebijakan publik merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan dan mengarah kepada tujuan tertentu. Bukan hanya sekedar aktivitas atau perilaku menyimpang dan serba acak, (*at random*) asal-asalan dan serba kebetulan. Sehingga segala bentuk kebijakan baik dalam bidang pembangunan, sosial politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya merupakan aktivitas atau tindakan yang

sudah direncanakan (*by planed*). 2) kebijakan publik merupakan aktivitas yang memiliki pola dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang memiliki arah dan tujuan yang jelas, dilakukan oleh pejabat-pejabat negara atau pemerintah. Kebijakan publik bukan keputusan yang berdiri sendiri serta keputusan individu-individu saja. 3) Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu, bukan hanya apa yang diinginkannya. Sehingga harus ada aksi nyata dalam menangani permasalahan yang terjadi. Kebijakan publik tidak cukup dengan kata-kata melainkan harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 4) kebijakan publik dapat berbentuk positif dapat pula berbentuk negatif. Dalam kebijakan yang berbentuk positif, pemerintah akan mengambil peran dalam tindakan-tindakan tertentu guna menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Sedangkan kebijakan publik yang berbentuk negatif, pemerintah tidak mengambil keputusan untuk mengambil tindakan terhadap suatu masalah yang sebenarnya membutuhkan campur tangan pemerintah (Sitorus et al., 2020).

Strategi yang jelas dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian bahwa implementasi program yang efektif dapat dilihat dari aspek proses analisis perumusan kebijakan yang mantap (S. Siagian, 2008). Proses analisis perumusan kebijakan yang mantap dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh. Proses analisis perumusan kebijakan yang mantap yang dapat digunakan menangani permasalahan. Karena apabila analisis dan perumusannya salah maka penanganan masalah sulit tercapai. Upaya proses analisis perumusan kebijakan yang mantap akan membuat program lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus dkk., yang menyatakan bahwa akibat proses analisis perumusan kebijakan yang mantap akan membuat mudah dalam mencaapai kriteria program KOTAKU

[17]. Analisis perumusan kebijakan merupakan aspek penting untuk menjalankan program yang efektif. Berdasarkan uraian di atas, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memiliki kemantapan dalam proses analisis dan perumusan kebijakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator ketiga dari efektifitas program, yakni proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.

Perencanaan yang Matan

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan setiap organisasi apapun kegiatannya tanpa melihat apakah yang bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlihat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan. Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.

Dalam perencanaan Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, sampai proses pelaksanaannya dapat berjalan beriringan, sehingga selain tujuan penanganan tercapai tanpa memunculkan masalah baru (kumuh baru), strategi lain dalam penanganannya dilakukan secara komprehensif, yakni infrastruktur, sosial dan ekonomi, dislokasi kumuh dan membangun kolaborasi antar pelaku, serta program dan pendanaan (tingkat komunitas, daerah dan pusat).

Program KOTAKU ditujukan untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Program KOTAKU menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor.

Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Hasil perencanaan ini menentukan kegiatan prioritas untuk mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru, yang akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

Perencanaan partisipatif dalam Program KOTAKU dapat dilihat dari peserta yang hadir saat rapat MUSREMBANGDES, yang diikuti oleh warga masyarakat meski kenyataannya dalam tahap perencanaan, peran partisipasi masyarakat dalam MUSREMBANG belum sepenuhnya berjalan optimal ataupun kurang aktif. Hal ini dikarenakan warga telah diwakilkan oleh aparat daerah, Badan Keswadayaan Masyarakat, tim KOTAKU Kota Sidoarjo, dan pihak swasta terkait

Perencanaan yang matang dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian bahwa implementasi program yang efektif dapat dilihat dari aspek perencanaan yang matang (S. Siagian, 2008). Perencanaan yang matang dapat digunakan untuk menyusun program penanganan permukiman kumuh. Perencanaan yang matang dapat digunakan menangani permasalahan. Karena apabila perencanaan salah maka penanganan masalah sulit tercapai. Upaya perencanaan program yang matang akan membuat program lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus, dkk., yang menyatakan bahwa adanya perencanaan program yang matang akan membuat mudah dalam mencaapai kriteria program KOTAKU (Sitorus et al., 2020). Perencanaan yang matang merupakan kunci penting untuk menjalankan program yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memiliki kematangan dalam perencanaan program KOTAKU. Oleh

karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator keempat dari efektifitas program, yakni proses perencanaan yang matang.

Penyusunan Program yang Tepat

Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Penyusunan program kerja sangat penting dilakukan untuk dapat mempermudah kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Penyusunan program dilakukan dengan melihat masalah yang ada dalam desa kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan program untuk menangani masalah tersebut. Penyusunan program kerja dilakukan dengan rapat bersama masyarakat.

Penyusunan program kerja KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah melalui Rembug Warga Tahunan (RWT) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Rembug Warga Tahunan (RWT) merupakan rapat bersama warga desa atau perwakilan dari masyarakat (RT) dengan Pemerintah Desa, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berserta anggota, dan seluruh tokoh masyarakat dari segala bidang.

Pembahasan dalam Rembug Warga Desa (RWT) diantaranya adalah tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) oleh BKM yang menjalankan program kerja selama satu tahun. Selain itu juga membahas tentang rancangan program kerja BKM untuk tahun ke depan selama satu tahun.

Program-program tersebut tentunya harus terakomodasi dalam RPJM/RKP Desa, Renstra/Renja Kecamatan yang dilengkapi perencanaan rinci dalam dokumen RPLP. Perencanaan di tingkat Kelurahan/desa tersebut tentunya harus selaras dengan perencanaan tingkat kabupaten/Kota dan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan rencana tahapan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh diwilayah Kabupaten/Kota.

Petunjuk Pelaksanaan ini akan menjadi acuan pelaksana program ditingkat Kelurahan/desa yang menjadi lokasi sasaran Program KOTAKU. Kami harapkan, Petunjuk Pelaksanaan ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program KOTAKU ditingkat Kelurahan/desa, sehingga pelaksanaan ditingkat Kelurahan/desa dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Penyusunan program yang baik dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian bahwa implementasi program yang efektif dapat dilihat dari aspek penyusunan program yang baik (S. Siagian, 2008). Penyusunan program yang baik dapat digunakan

untuk mengatasi penanganan permukiman kumuh. Penyusunan program yang baik dapat digunakan menangani permasalahan. Karena apabila penyusunan program salah maka penanganan masalah sulit tercapai. Upaya penyusunan program yang baik akan membuat program lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashad dkk, yang menyatakan bahwa adanya penyusunan program yang baik akan berdampak pada pencapaian kriteria program KOTAKU (Ashad et al., 2020). Penyusunan program yang baik merupakan kunci penting untuk menjalankan program yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memiliki penyusunan program KOTAKU yang tepat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator kelima dari efektifitas program, yakni penyusunan program yang tepat.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi, maka implementasi Program KOTAKU dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan sulit mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan dan terkait juga dengan sarana dan prasarana yang digunakan. Program yang dijalankan sangat tergantung dari sejauh mana dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan membuat pelaksana mudah dalam mewujudkan tujuan.

Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil penelitian sudah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana dalam bentuk fisik maupun non fisik. Sarana fisik antara lain terkait dengan kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sarana non fiksi antara lain pelatihan-pelatihan dan pendidikan, seminar atau *workshop*.

Penyusunan program yang baik dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian bahwa implementasi program yang efektif dapat dilihat dari aspek penyusunan program yang baik (S. Siagian, 2008). Penyusunan program yang baik dapat digunakan untuk mengatasi penanganan permukiman kumuh. Penyusunan program yang baik dapat digunakan menangani permasalahan. Karena apabila penyusunan program salah maka penanganan masalah sulit tercapai. Upaya penyusunan program yang baik akan membuat program lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashad, dkk., yang menyatakan bahwa adanya penyusunan program yang baik akan berdampak pada

pencapaianan kriteria program KOTAKU (Ashad et al., 2020). Penyusunan program yang baik merupakan kunci penting untuk menjalankan program yang efektif. Hal tersebut mengacu pada indikator kejelasan tujuan program.

Mengacu pada uraian di atas, program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memiliki sarana dan prasarana program KOTAKU yang memadai. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator keenam dari efektifitas program, yakni tersedianya sarana dan prasarana program KOTAKU.

Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. Implementasi program KOTAKU harus mengacu pada hasil yang tepat sesuai yang telah ditentukan. Selain itu, program juga harus berjalan efisien yaitu antara upaya dan biaya yang dilakukan dengan hasil yang didapat harus terukur.

Penyusunan program yang baik dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian bahwa implementasi program yang efektif dapat dilihat dari aspek penyusunan program yang baik (S. Siagian, 2008). Penyusunan program yang baik dapat digunakan untuk mengatasi penanganan permukiman kumuh. Penyusunan program yang baik dapat digunakan menangani permasalahan. Karena apabila penyusunan program salah maka penanganan masalah sulit tercapai. Upaya penyusunan program yang baik akan membuat program lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safrizal dkk., yang menyatakan bahwa adanya penyusunan program yang baik akan berdampak pada pencapaian kriteria program KOTAKU (Safrizal et al., 2021). Pebyusnann program yang baik merupakan kunci penting untuk menjalankan program yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan program KOTAKU dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator ketujuh dari efektifitas program, yakni pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Dalam menjaga dan memastikan Program KOTAKU berjalan sesuai dengan yang direncanakan maka perlu pengawasan dan pengendalian. Melalui pengawasan yang baik maka penyimpangan dan penyelewengan dapat diminimalisasi atau dicegah. Melalui pengendalian yang baik maka pelaksanaan program dapat dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Pengawasan dan pengendalian Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Adanya pengawasan dan pengendalian tidak terlepas dari sifat manusia yang tidak sempurna, perlu diawasi dan dikendalikan. Pengawasan dan pengendalian dalam Program KOTAKU berasal dari masyarakat, LKM, pemerintah desa, dan dari internal koordinator kota Sidoarjo sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safrizal dkk., yang menyatakan bahwa adanya penyusunan program yang baik akan berdampak pada pencapaian kriteria program KOTAKU (Safrizal et al., 2021). Penyusunan program yang baik merupakan kunci penting untuk menjalankan program yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, Sistem Pengawasan dan Pengendalian Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Bersifat Mendidik program KOTAKU dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator kedelapan atau terakhir dari efektifitas program, yakni sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Dalam implementasi Program KOTAKU di Desa Sruni, tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas Program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Faktor Pendukung Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Faktor pendukung efektivitas Program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yaitu Kompetensi Fasilitator yang terlibat dalam implementasi Program KOTAKU sesuai dengan kebutuhan program, Fasilitas yang dimiliki Program KOTAKU dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima proyek Program KOTAKU telah dinilai memadai, Pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Sruni didukung dengan anggaran yang memadai yakni mendapatkan anggaran sebesar 995.000 juta rupiah yang berasal dari APBD agar seluruh program dan kebijakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya, dan Struktur organisasi memberikan kejelasan tanggung jawab, kedudukan dan koordinasi antar anggota jelas, kejelasan jalur hubungan anggota, serta dapat sarana pengendalian dan pengawasan kinerja organisasi Program KOTAKU. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Nurhasanah (2019), faktor pendukung program Kotaku di Kelurahan Merjosari adalah partisipasi masyarakat yang berupa tenaga, uang, serta harta benda yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Faktor Penghambat Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Faktor penghambat efektivitas Program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yaitu informasi hoax dan keterbatasan kuantitas fasilitator. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Fitri dan Sakawati faktor penghambat implemmentasi program KOTAKU di Kecamatan Tanete Riattang adalah keterbatasan lahan, pola pikir masyarakat dan anggota BKM yang tidak aktif (Fitri & Sakawati, 2021).

Simpulan

Sesuai paparan hasil penelitian yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan teori Efektifitas Siagian (S. P. Siagian, 2008) yang terdiri dari 8 (delapan) indikator, yakni efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, sudah baik berdasarkan indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah Program KOTAKU sudah merumuskan tujuan yang dapat dipahami oleh semua pihak dan telah disosialisasikan secara menyeluruh yakni meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan program, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah melibatkan semua pihak secara partisipatif. Berdasarkan indikator proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah dianalisis dan dirumuskan dengan mantap sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Berdasarkan indikator perencanaan yang matang, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah direncanakan dengan matang dengan diikuti oleh warga masyarakat setempat secara partisipatif. Berdasarkan indikator penyusunan program yang tepat, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah menyusun program dengan tepat. Dalam menyusun semua program, semua pihak dilibatkan dan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa. Berdasarkan indikator tersedianya sarana dan prasarana kerja, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana dalam bentuk fisik maupun non fisik. Sarana fisik antara lain terkait dengan kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sarana non fiksi antara lain pelatihan-pelatihan dan pendidikan, seminar atau workshop. Berdasarkan indikator pelaksanaan yang efektif dan efisien, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memberikan pengaruh positif bagi penurunan permukiman kumuh. Hal ini salah satunya

dapat dilihat dari keberhasilan Program KOTAKU dalam mengatasi penyebab permukiman kumuh, kawasan kumuh menjadi berkurang, permasalahan lingkungan seperti banjir dan akses jalan dapat teratasi. Berdasarkan indikator sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan baik yang melibatkan seluruh pihak seperti masyarakat, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, dan dari internal koordinator Kota Sidoarjo sendiri.

Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan program memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni. (a) kompetensi fasilitator; (b) fasilitas memadai; (c) anggaran yang memadai; (d) struktur organisasi yang jelas. Faktor penghambat yaitu : (a) informasi tidak benar atau hoax yang beredar di media sosial tentang Program KOTAKU; (b) keterbatasan jumlah fasilitator dalam membantu implementasi program.

Upaya yang bisa dijalankan oleh Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo untuk mengefektifkan program tersebut yakni melakukan sosialisasi Program KOTAKU agar informasi mengenai program KOTAKU dapat diketahui semua pihak sehingga partisipasi masyarakat tinggi dalam mengurangi permukiman kumuh; program KOTAKU di Desa Sruni Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan dan evaluasi program melalui pelatihan; program KOTAKU sebaiknya melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder; program KOTAKU perlu menerapkan teknologi dan informasi, sehingga SOP dapat membantu operasional implementasi program dapat berjalan lebih baik. Untuk meningkatkan efektivitas Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, perlu meningkatkan faktor-faktor pendukung program tersebut yakni dengan cara memberikan pelatihan atau seminar terhadap fasilitator mengenai program KOTAKU atau program-program kebersihan dan kesehatan lingkungan lainnya, mengembangkan fasilitas serta memperbaiki fasilitas program KOTAKU yang lebih baik, mengalokasikan anggaran untuk keperluan program KOTAKU dengan efektif mungkin seperti dengan memprioritaskan keperluan yang paling dibutuhkan atau paling urgent, dan lebih memperjelas jobdesc dengan menghindari adanya tugas atau kewajiban ganda. Selain itu juga perlu mengatasi hal-hal yang menghambat program KOTAKU dengan memberantas informasi-informasi hoax mengenai program KOTAKU, membagikan informasi yang up-to-date agar masyarakat mengerti perkembangan program KOTAKU, serta menambah jumlah fasilitator.

Daftar Pustaka

- Ashad, H., Musa, R., & Yanti, A. N. (2020). "Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur (Studi Kasus Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar)." *Fly Over: Open Journal System: Open Sciences Framework*.
- Budiharjo, E. (1998). *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung: Alumi.

- Effendy. (2008). *Efektivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fitri, A., & Sakawati, H. (2021). "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone." Skripsi, Universitas Negeri Makassar.
- Fitriani, P. (2020). "Penerapan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan." Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Kurniasih, S. (2007). "Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Pertukangan Utara Jakarta Selatan." *Journal of Faculty of Engineering, Universitas Budi Luhur*, 2007.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oktaviansyah, E. (2012). "Penataan Permukiman Kumuh Rawan Bencana Kebakaran di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan." *Journal of Urban and Regional Planning*, 4(2), 2012.
- Olotuah, A. O. (2012). "Slums." *International Encyclopedia of Housing and Home*.
- Safrizal, Safuridar, & Fuad, M. (2021). "Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Kasus pada Wilayah Langsa)." *Journal of Samudra Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 200-213.
- Santosa, B. (2012). "Kesiapan dan Ketersediaan Pemangku Kepentingan untuk Peremajaan Kawasan Kumuh Melalui Pembangunan Rumah Susun: Studi Kasus Di Kota Semarang." *Jurnal Perkotaan*, 4(2), 2012.
- Setiawan, D., Argenti, G., & Riski, M. F. (2021). "Peningkatan Kemampuan Sosial Masyarakat dan Komitmen Politik Kepala Daerah dalam Pengentasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon." *Gorontalo: Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 52-68.
- Siagian, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinulingga, B. D. (2005). *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitorus, H., Astuti, R. S., & Purnaweni, H. (2020). "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang." *SAWALA: Journal of Public Administration*, 8(1), 74-94.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: CAPC (Center of Academic Publishing Service).
- Yunus, H. S. (2008). *Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.